



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Peran

Menurut Soekamto (2004:212) Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan, dalam pendapatnya lebih lanjut menjelaskan apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran, perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya.

Menurut Soekamto (2009:213), menyatakan peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat organisasi.
3. Peranan dapat dikatakan juga sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dalam sebuah organisasi, menurut Rivai (2004:147-148), ada terdapat dua peranan yang berbeda yaitu:

- 1.) Peran kepemimpinan yaitu mengerjakan hal yang benar. Ini ada hubungannya dengan visi dan arah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Peranan Manajemen yaitu mengerjakan hal secara benar atau pelaksanaan. Sehubungan dengan manajemen dapat dilihat dari pendapat Ichak Adizes dalam Thoha (2003:264) “ada empat peranan manajemen yang harus dilaksanakan oleh manajer jika organisasi yang dipimpinnya bisa berjalan secara efektif. Empat peranan itu ialah memproduksi, melaksanakan, melakukan informasi, dan memadukan”.

Pada prinsipnya, peranan manajemen yang dimaksudkan Adizes tersebut di atas adalah peranan yang lazim dilakukan oleh manajer-manajer perusahaan. Selain pendapat Adizes, dapat juga kita lihat Menurut Henry Mintzberg dalam Thoha (2003:264- 274): “Ada 3 peranan utama yang dimainkan oleh setiap orang/manajer dimanapun letak hierarkinya.” Dari 3 peranan utama ini kemudian diperinci menjadi 10 peranan yaitu:

1. Peranan Hubungan Antar Pribadi yang terdiri dari:
 - a) Peranan sebagai Figurehead, yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
 - b) Peranan sebagai pemimpin, dalam peranan ini manajer bertindak sebagai pemimpin.
 - c) Peranan sebagai pejabat perantara, disini manajer melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staff dan orang-orang lain yang berada di luar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.
2. Peranan yang berhubungan dengan informasi yang terdiri dari:
 - a) Sebagai monitor, peranan ini mengidentifikasikan seorang manajer sebagai penerima dan pengumpulan informasi, agar ia mampu untuk mengembangkan suatu pengertian yang baik bagi organisasi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipimpinnya, dan mempunyai pemahaman yang komplit tentang lingkungannya.

- b) Sebagai Dessinator, peranan ini melibatkan manajer untuk menangani proses transmisi dari informasi ke dalam organisasi yang dipimpinnya.
 - c) Sebagai juru bicara (Spokesman), peranan ini dimainkan manajer untuk penyampaian informasi keluar lingkungan organisasinya.
3. Peranan Pembuat Keputusan, terdiri dari:
- a) Peranan sebagai enterprneur, dalam peranan ini mana jer bertindak sebagai pemarkarsa dan perancang dari banyak perubahan- perubahan yang terkendali dalam organisasinya.
 - b) Peranan sebagai penghalau gangguan, peranan ini membawa manajer untuk bertanggung jawab terhadap organisasi ketika organisasinya terancam bahaya, misalnya: akan dibubarkan, terkena gossip, isu-isu kurang baik, dan lain sebagainya.
 - c) Peranan sebagai pembagi sumber (Resource Allocator), membagi sumber dana adalah suatu proses pembuatan keputusan. Disini manajer diminta memainkan peranan untuk memutuskan kemana sumber dana akan didistribusikan kebagian-bagian organisasinya.
 - d) Peranan sebagai negosiator, peranan ini meminta kepada manajer untuk aktif berpartisipasi dalam arena negosiasi.

Menurut Rivai, peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan dihadapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Covey dalam Rivai (2004:149), membagi peran menjadi tiga bagian yaitu:

1. Pencarian alur (Pathfinding) yaitu peran untuk menentukan visi dan misi yang pasti.
2. Penyelaras (Aligning) yaitu peran untuk memastikan bahwa struktur, sistem, dan proses operasional organisasi memberikan dukungan pada pencapaian visi dan misi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemberdayaan (Empowering) yaitu peran untuk menggerakkan semangat dalam diri orang-orang dalam mengungkapkan bakat, kecerdikan, dan kreativitas laten untuk mampu mengerjakan apa pun dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang di sepakati.

Menurut Suyonto dan Burhandin (2011:51-52) Peran atau roles adalah perilaku yang diharapkan dari suatu 10 posisi. Peran berkaitan dengan pengharapan perilaku untuk posisi- posisi tertentu. Teori peran menjelaskan bagaimana pengharapan sosial dapat mempengaruhi perilaku karyawan (kreitner dan kinicki, 2005). Perilaku- perilaku yang diharapkan ini biasanya sudah disepakati baik oleh individu pemegang posisi atau jabatan tersebut maupun oleh para anggota organisasi. Misalnya seorang direktur pemasaran suatu perusahaan diharapkan mengatur dan mengawasi departemen pemasaran. Di samping peran yang diharapkan atau expected role, ada juga peran yang dipersepsikan dan peran yang dijalankan. Peran yang dipersepsikan atau perceived role, adalah seperangkat perilaku yang diyakini oleh seseorang harus dia lakukan karena posisinya, sedangkan peran yang dijalankan atau enacted role, yaitu perilaku yang benar-benar dilakukan oleh orang tersebut. Dalam suatu organisasi ada sejumlah individu yang memiliki peran ganda, misalnya selain menjabat direktur pemasaran seseorang juga menjadi anggota serikat pekerja. Peran ganda ini kadang-kadang cocok satu sama lain, tetapi tidak jarang bertentangan.

2.2 Konsep Pengawasan

Pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. (Handoko, 2012;359)

Pengawasan adalah proses pemantauan kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar dan tujuan organisasional yang diharapkan. (Marnis, 2010;344) Tiga tipe pengawasan menurut Handoko (2012;361) yaitu:

- a. Pengawasan pendahuluan (*feedforward control*). Pengawasan pendahuluan sering disebut *steering control*, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu siap.
- b. Pengawasan concurrent yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*).
- c. Pengawasan umpan balik (*feedback control*) yaitu pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai *past-action controls*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

Jadi pengawasan dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi seorang manajer yang bertujuan untuk memperoleh suatu tingkat keterjaminan efektivitas dan efisien pencapaian tujuan organisasi.seperti di definisikan oleh terry (dalam Zulkifli 2009;122). Bahwa pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan (bila perlu) memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang di rencanakan.

Menurut Siagian (2008;115) proses-proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Pengawasan langsung
Yang dimaksud dengan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahannya.
2. Pengawasan tidak langsung
Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang di sampaikan oleh para bawahan.
Menurut Massie (dalam Zulkifli 2005;207), pengawasan merupakan proses yang mengukur prestasi yang berjalan dan menentukan ke arah yang telah di tentukan sebelumnya, pengertian pengawasan ini ternyata berkembang dan berubah mengikuti perkembangan praktis manajemen dan masyarakat. Pengertian pengawasan berkembang mulai dari sifat mandor, kontroler, mencari kesalahan sampai pada upaya yang lebih halus dalam fungsi kepemimpinan. Saat ini fungsi pengawasan lebih di anggap merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar Visi, Misi, Tujuan dan rencana yang sudah di tetapkan dapat tercapai sebagaimana semestinya.

Alasan sangat fundamental dan universal mengapa manajer membutuhkan pengawasan adalah kebutuhan memonitor apa yang orang atau unit organisasi sedang kerjakan dan secara khusus hasil dari apa yang mereka kerjakan. Alasan lain adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan yang dihadapi oleh organisasi dan manajer. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi dan lingkungan dalam mana organisasi beroperasi. Dan untuk membantu manajer memprediksi, memonitor, dan menentukan perubahan-perubahan kondisi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasilnya menjadi masukan bagi perencanaan dan ini menunjukkan hubungan antara perencanaan dan kontrol.

Menurut Handoko (2012;373) Secara umum pengawasan yang efektif mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Akurat (*Accurate*)

Informasi atas kinerja harus akurat. Ketidakakuratan data dari suatu sistem pengendalian dapat mengakibatkan organisasi mengambil tindakan yang akan menemui kegagalan untuk memperbaiki suatu permasalahan atau menciptakan permasalahan baru.

2. Tepat waktu (*timely*)

Informasi harus dihimpun, diarahkan, dan segera dievaluasi jika akan diambil tindakan tepat pada waktunya guna menghasilkan perbaikan.

3. Objektif dan komprehensif (*objective and comprehensible*)

Informasi dalam suatu sistem pengawasan harus mudah dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya.

4. Dipusatkan pada tempat pengawasan strategis (*focused on strategic control points*). Sistem pengawasan strategis sebaiknya dipusatkan pada bidang yang paling banyak kemungkinan akan terjadi penyimpangan dari standar, atau yang akan menimbulkan kerugian yang paling besar. Selain itu, sistem pengawasan strategis sebaiknya dipusatkan pada tempat dimana tindakan perbaikan dapat dilaksanakan seefektif mungkin.

5. Secara ekonomi realistis (*economically realistic*)

Pengeluaran biaya untuk implementasi harus ditekankan seminimum mungkin sehingga terhindar dari pemborosan yang tidak berguna. Usaha untuk meminimumkan pengeluaran yang tidak produktif adalah dengan cara mengeluarkan biaya yang paling minimum yang diperlukan untuk memastikan bahwa aktifitas yang dipantau akan mencapai tujuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Secara organisasi realistik (*organizationally realistic*)

Sistem pengawasan harus dapat digabungkan dengan realitas organisasi misalnya, individu harus dapat melihat hubungan antara tingkat kinerja yang harus dicapainya dan imbalan yang akan menyusul kemudian.

7. Dikoordinasikan dengan arus pekerjaan organisasi (*coordinated with the organization's work flow*). Informasi pengawasan perlu untuk dikoordinasikan dengan arus pekerjaan diseluruh organisasi karena dua alasan. Pertama, setiap langkah dalam proses pekerjaan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan seluruh operasi. Kedua, informasi pengawasan harus sampai pada semua orang yang perlu untuk menerimanya.

8. Fleksibel (*flexible*)

Pada setiap organisasi pengawasan harus mengandung sifat fleksibel yang demikian rupa sehingga organisasi tersebut dapat segera bertindak untuk mengatasi perubahan yang merugikan atau memanfaatkan peluang baru.

9. Prespektif dan operasional (*prespective and operational*)

Pengawasan yang efektif dapat mengidentifikasi tindakan perbaikan apa yang perlu diambil setelah terjadi penyimpangan dan standar. Informasi harus sampai dalam bentuk yang dapat digunakan ketika informasi itu tiba pada pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan perbaikan.

10. Diterima para anggota organisasi (*accepted by organization members*) Agar sistem pengawasan dapat diterima oleh para anggota organisasi, pengawasan tersebut harus bertalian dengan tujuan yang berarti dan diterima. Tujuan tersebut harus mencerminkan bahasa dan aktifitas individu kepada situasi tujuan tersebut dipertautkan.

Dalam organisasi terdapat beberapa faktor yang menuntut perlunya di

operasikan fungsi pengawasan yaitu:

- a. Perubahan dalam lingkungan organisasi.
- b. Kompleksitas organisasi.
- c. Kesalahan yang sering terjadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Dampak delegasi wewenang.

Pengawasan dilakukan untuk mendapatkan kepastian pencapaian tujuan organisasi secara efektifitas dan efisiensi, deskripsi dari kegunaan pelaksanaan pengawasan yang lebih luas dipaparkan oleh William Travers Jerome III, dalam Harahap, 1996; 313 (dalam Zulkifli 2009; 122) sebagai berikut:

1. Kontrol digunakan untuk mendapatkan standard prestasi yang dimaksudkan untuk menaikkan efisiensi dan menekan biaya.
2. Kontrol digunakan untuk mengamankan aset perusahaan-perusahaan dari kemungkinan kecurian, pemborosan dan penyalahgunaan.
3. Kontrol digunakan untuk membuat standar kualitas untuk menjamin kualitas yang diinginkan, pelanggan atau manajer produksi tetap terjaga.
4. Kontrol didesain untuk menetapkan batas wewenang yang diselesaikan oleh top manajemen.
5. Kontrol digunakan untuk mengukur prestasi kerja.
6. Kontrol digunakan untuk perencanaan dan penyusunan program kegiatan.
7. Kontrol digunakan untuk menyeimbangkan berbagai macam rencana dan program yang ditetapkan top manajemen.
8. Kontrol didesain untuk memotivasi karyawan dalam perusahaan sehingga mereka dapat menyumbang prestasi terbaiknya kepada perusahaan.

Secara sederhana pengawasan adalah tujuan setiap orang dalam setiap pencapaian di capai, tujuan tercakup fungsi pengawasan (*Controlling*). Fungsi ini merupakan tanggung jawab yang tidak terpisahkan dari suatu kepemimpinan, inilah arti pengawasan yang sebenarnya.

Jika pengertian ini yang dicapai, maka jelaslah bagi kita bahwa setiap orang butuh akan tercapainya pengawasan, bukan sebaliknya. Adapun persyaratan

yang harus di penuhi agar suatu lembaga pengawasan berhasil dalam fungsinya adalah:

1. Lembaga ini tidak tertarik dengan fungsi operasional perusahaan. Hal ini yang di maksudkan agar posisinya dalam pengawasan itu bebas dari kepentingan pribadi dan bagian lainnya.
2. Usahakan agar lembaga ini tetap dalam posisi independen dengan fungsi operasional maupun secara nyata, bebas dari unsur-unsur yang kelihatannya tidak independen.

Manulang (2006;174) menjelaskan bahwa suatu sistem pengawasan yang efektif harus dapat segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat diambil tindakan untuk pelaksanaan, selanjutnya agar pelaksanaan keseluruhan benar-benar dapat sesuai atau mendekati apa yang di rencanakan sebelumnya. Suatu sistem pengawasan adalah efektif, apabila sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Hal ini berarti bahwa sistem pengawasan itu tatap digunakan meskipun terjadi perubahan-perubahan terhadap rencana diluar dugaan.

Mengenai adanya perbedaan istilah pengertian pengawasan maka Atmodiwiro (2015 ; 180) memberikan pengertian Pengawasan Atasan Langsung (PAL) adalah kegiatan, usaha atau tindakan yang bersifat dinamis sedangkan system pengendalian intern dan sistem pengendalian manajemen (SPM dan SPI) adalah suatu system yang bersifat statis yang melekat pada setiap organisasi.

Sistem pengendalian manajemen (SPM) dapat di artikan sebagai suatu alat dari alat-alat lainnya untuk mengimplementasikan strategi yang berfungsi untuk memotivasi anggota-anggota organisasi guna mencapai tujuan organisasi. Sistem pengendalian manajemen (SPM) adalah perolehan dan penggunaan informasi

untuk membantu mengkoordinasikan proses pembuatan perencanaan dan pembuatan keputusan melalui organisasi dan untuk memandu perilaku manajemen.

Sedangkan pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus yang dilakukan atasan langsung terhadap bawahan, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Silalahi (2002;391) pengawasan adalah kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar dan tujuan organisasional yang diharapkan. Kinerja aktual diketahui dari usaha-usaha optimis pemanfaatan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas, sementara kesesuaian antara kinerja aktual dan tujuan yang diharapkan diketahui dengan membandingkan hasil yang di capai dengan standart organisasi.

Sedangkan menurut Terry (dalam Zulkifli 2005;204) bahwa pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan (bila perlu) memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang di rencanakan.

Tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan pengawasan yang lebih terperinci dikemukakan oleh Terry (dalam zulkifli dan Yogi 2014;137) yaitu sebagai berikut :

1. Menetapkan standar.
2. Menetapkan Pelaksanaan kegiatan pengawasan (data hasil pengamatan. Laporan dan data statistik)
3. Pengadakan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Koreksi, penyesuaian kegiatan operasional supaya mencapai hasil yang sama seperti yang direncanakan.

Sujamto (2000;19) Pengawasan adalah segala sesuatu atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Keterkaitan pelaksanaan sistem pengawasan dengan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya dapat dicermati melalui pemahaman terhadap pendapat William H. Newman (dalam Zulkifli dan Yogi 2014;137) tentang langkah-langkah dasar fungsi pengawasan. Newman mengemukakan lima langkah dasar yang dapat diterapkan terhadap semua jenis pengawasan sebagai berikut:

1. Tetapkan hasil-hasil yang ingin dicapai.
2. Tetapkan peramal hasil-hasil (indikator hasil-hasil) Seperti:
 - a. Pengukuran input,
 - b. Hasil-hasil langkah awal,
 - c. Gejala-gejala,
 - d. Perubahan dalam kondisi yang di awasi,
3. Tetapkan standar untuk peramal dan hasil-hasil.
4. Tetapkan jaringan informasi dan umpan balik.
5. Evaluasi informasi dan ambil tindakan korektif.

Untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan pengawasan tentu harus ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam proses pengawasan. Menurut Handoko (2003;362) mengemukakan bahwa proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit lima tahapan. Tahapan-tahapannya adalah :

1. Penetapan standar pelaksanaan pengawasan (perencanaan) standar mengandung arti sebagai suatu kesatuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.

Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan.

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu :

- a. Pengamatan (Obsevasi)
- b. Laporan-laporan baik lisan maupun tertulis.
- c. Metoda-metoda otomatis.
- d. Inspeksi, pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel.

4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan

tahap kritis dari tahap pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (defiasi).

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah pelaksanaan diperbaiki atau keduanya dilakukan bersamaan.

Sementara itu menurut Siswanto (2013;140) pengawasan memiliki peran yang sangat penting guna membandingkan kinerja aktual dengan standar yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah di tetapkan maka dengan demikian, menyatakan terdapat empat langkah dalam pengawasan , yaitu sebagai berikut :

1. Menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja .
2. Mengukur kinerja.
3. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar.
4. Mengambil tindakan perbaikan.

Adapun manfaat pengawasan menurut Brantas (2009;191) adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan, pengawasan pada dasarnya menekankan langkah-langkah pembenahan atau koreksi yang objektif jika terjadi perbedaan atau penyimpangan antara pelaksana dengan perencanaan.

2.2.1 Pengawasan Pabean

Dalam kasus penyelundupan dan perdagangan illegal barang elektronik di Kota Tanjung Balai Karimun, Peneliti merasa perlu juga menggunakan penjelasan mengenai konsep pengawasan Pabean guna berfokus pada pembahasan tentang pengawasan dan guna menganalisis data yang peneliti dapatkan dari KPPBC Bea Tanjung Balai Karimun mengenai kinerjanya dalam melakukan pengawasan terhadap lalu lintas perdagangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeaan, kepabeaan di definisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk. Sementara itu, daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu seperti zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang No. 17 Tahun 2006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan Pabean adalah pengawasan yang bertujuan untuk memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas perbatasan Negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan dan prosedur pabean yang ditetapkan. Selain melakukan penyidikan dan penindakan, di dalam fungsi pengawasan Pabean juga dilakukan upaya-upaya Preventif yakni berupa Patroli dan pemeriksaan dokumen-dokumen barang muatan kapal guna menghindari pelanggaran-pelanggaran berupa penyelundupan. Fungsi Penindakan dan Penyidikan serta upaya-upaya Preventif tadilah yang akan penulis gunakan dalam membaca data tentang fungsi pengawasan yang dilakukan oleh KPP Bea Cukai maupun aparatur pengawas lalu lintas barang dan orang lainnya.

Di dalam beberapa literature review yang telah peneliti paparkan sebelumnya juga banyak membahas tentang pengawasan kepabeanan. Peran dan fungsi pabean yang dimiliki oleh Bea dan Cukai maupun fungsi pengawasan yang juga dimiliki oleh polisi dan aparatur lain menjadi hal kunci untuk menimalisir tindakan penyelundupan dan perdagangan illegal. Namun, yang menjadi permasalahan yang hampir ditemukan disetiap penelitian sebelumnya yaitu tentang kinerja dan moral dari aparatur di lapangan itu sendiri sehingga dalam beberapa kasus menyebabkan kegiatan ekonomi illegal tersebut masih saja berjalan dan lolos dari pengawasan petugas.

2.3 Konsep Penyeludupan Barang

2.3.1 Pengertian Penyeludupan

Dalam ordonansi bea hanya dijumpai rumusan perbuatan tindak pidana atau delik. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 26 b ordonansi bea staatsblad 417 (Moch.Anwar, 1986:105) sebagai berikut:

“barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor barangbarang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya, atau yang mengangkut ataupun menyimpang barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3”

Sedangkan pengertian mengenai penyelundupan terdapat dalam Keputusan

Presiden Nomor 73 Tahun 1967 tertanggal 27 Mei 1967 bahwa:

“tindak pidana penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor)”.

Pengertian terakhir ini lebih mendekati pengertian yudiris, tetapi berbeda sedikit dari pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah (1988:1), yang menyatakan sebagai berikut:

“penyelundupan atau penyelundup sebenarnya bukan istilah yudiris, tetapi pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke luar atau ke dalam negeri dengan latar belakang tertentu”.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelundupan adalah suatu perbuatan manusia yang memasukkan atau mengeluarkan barang dari dalam negeri atau keluar negeri dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan, atau

dengan kata lain tidak dengan secara resmi sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyeludupan

Perilaku menyimpang dalam aktivitas ekonomi di daerah perbatasan memiliki kaitan dengan tingginya angka kemiskinan, minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mengolah potensi alam yang ada selain infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi setempat. tingginya angka pengangguran menjadi salah satu penyumbang naiknya angka kriminalitas. Model ekonomi sederhana memprediksi bahwa peluang pasar tenaga kerja yang semakin sulit membuka kemungkinan bagi individu untuk terlibat dalam tindak kriminal sehingga bisnis ilegal lintas batas yang dikembangkan secara alami dipandang sebagai jalan terakhir bagi penduduk setempat karena tidak sanggup mengelola sumber daya yang tersedia. Permasalahan lainnya adalah terjadinya kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga, sarana dan prasarana yang masih minim, tingginya angka kemiskinan dan jumlah keluarga prasejahtera, terisolasinya kawasan perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas menuju kawasan perbatasan dan rendahnya kualitas SDM. Hal lain yang memicu maraknya impor ilegal adalah sulitnya mengurus perijinan impor yang kompleks, rigid (kaku), dan berbelit-belit. Kondisi tersebut menurut para importir semakin diperparah dengan adanya oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi dengan meminta bayaran supaya perijinan bisa diurus secara cepat. Berbeda halnya jika import menggunakan cara borongan ilegal, disini “importir” cukup bekerjasama dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oknum Bea Cukai dan Perusahaan jasa pengurusan impor (PPJK / Freight Forwarder) untuk meloloskan barang-barang tersebut. Caranya bisa bermacam-macam, mulai dari manipulasi kode HS (Harmonized System) hingga manipulasi jumlah bea masuk & pajak yang dibayarkan, biasanya para oknum tersebut meminta harga borongan per kontaine Tindak pidana penyelundupan di Indonesia di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling mempunyai hubungan kausal. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Faktor Geografis

Luasnya kepulauan nusantara yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, yaitu Asia dan Australia dan dua samudera dengan garis pantai yang terbentang luas dan yang sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga yang sudah lebih dahulu mengalami kemajuan baik di bidang perekonomian maupun industri membuka kesempatan atau peluang, atau bahkan dapat merangsang para pengusaha (lokal maupun asing) untuk melakukan penyelundupan. Keadaan ini misalnya terutama di manfaatkan oleh para penyelundupan di sekitar kepulauan Riau, Aceh (Lhokseumawe, Sabang, Langsa dan lain-lain), Sumatera Utara (Belawan, Tanjung Balai Asahan dan pengkalan Brandan), Sulawesi utara, tengah dan tenggara, Kalimantan barat dan timur, Maluku dan daerah-daerah pantai lainnya.

2. Kondisi Industri Dalam Negeri

Tidak dapat di sangkal, bahwa kondisi industri dalam negeri turut pula mempengaruhi timbulnya Tindak Pidana penyelundupan, karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana diketahui, produksi industri dalam negeri pada umumnya masih dalam tahap perkembangan, sehingga hasilnya pun masih belum dapat di andalkan. Tingginya biaya produksi menjadikan hasil produksi kurang mampu bersaing dengan barangbarang hasil luar negeri. Keadaan ini di tambah lagi dengan tingginya biaya transportasi dan minimnya sarana angkutan, sehingga menyebabkan hambatan dalam distribusi dan pemasaran.

Harga barang-barang buatan RRC jauh lebih murah dibandingkan dengan barang-barang yang sama produksinya dalam negeri, padahal ongkos tenaga kerja di RRC masih jauh lebih tinggi dibanding tenaga kerja di dalam negeri. Sehingga hal ini tidak kurang membuat bingung para pengusaha dan pengambil keputusan di negara kita. Keadaan seperti ini menggambarkan bahwa hasil produksi dalam negeri masih belum mampu bersaing dengan barang-barang hasil produksi impor. Dengan adanya disparitas harga antara produk lokal dengan produk impor membuka kemungkinan para penyelundup melakukan aksinya.

3. Sumber Daya Alam (SDA)

Faktor sumber daya alam Indonesia turut pula mempengaruhi frekuensi penyelundupan. Hal ini bisa di perhatikan dengan banyaknya kekayaan alam kita berupa bahan-bahan bentah yang diinginkan oleh negara-negara lain untuk dijadikan sumber komoditi ekspor negara-negara yang bersangkutan. Kekayaan alam dan bumi Indonesia yang melimpah ruah, seperti kayu gelondongan, rotan (alasan), kayu hitam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(ebony), hewan-hewan yang di lindungi dan lain-lain yang kesemuanya ini yang sangat di butuhkan oleh negara-negara lain.

Negara - negara industri yang haus akan bahan-bahan mentah dan pasaran untuk melempar hasil industrinya di tambah pula dengan letak negaranya yang tidak jauh dari pantai-pantai Indonesia, maka masalah penyelundupan menjadi semakin menarik bagi pengusaha yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkannya kekayaan alam kita yang sangat dibutuhkan negara-negara industri tersebut sebagian ada yang karena bentuknya tidak boleh di ekspor (kecuali setelah di olah terlebih dahulu, seperti kayu gelonggongan yang harus diubah menjadi plywood. demikian juga rotan dan lain-lain) dan ada pula yang benar-benar dilarang untuk di ekspor karena termasuk langka dan dilindungi (seperti orang utan, burung cendrawasih dan lain - lain).

4. Kelebihan Produksi

Di negara-negara yang telah maju dan mapan di sektor industri dan perekonomiannya ada kalanya mengalami kelebihan produksi (over production) misalnya negara-negara yang berdekatan dengan negara kita seperti jepang, taiwan, korea selatan, hongkong, singapura dan lain-lain dimana negara ini mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil - hasil produksinya. Keadaan ini oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab lalu dimanfaatkan untuk kepentingan dan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara yang tidak sah atau ilegal, yaitu berusaha memasukan barang - barang dagangan mereka ke negara-negara lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui penyelundupan, di antaranya ke Indonesia. Bahkan beberapa negara-negara tertentu melakukan politik dumping sehingga kedatangan barang-barang impor ke negara-negara yang belum stabil hasil 40 produksinya mengalami keguncangan-keguncangan menghadapi persaingan barang-barang produksi impor. Hal ini bisa terjadi karena di samping barang-barang ekspor impor tersebut sangat dibutuhkan masyarakat seperti bawang putih dan juga baik mutu maupun harganya kadang-kadang jauh lebih baik dan lebih murah dibanding produksi dalam negeri, dan apabila keadaan ini terjadi maka bagi masyarakat sendiri tidak mempersoalkan lagi apakah barang-barang yang dibelinya itu dimasukan secara sah tau tidak, apalagi daya beli masyarakat kita memang masih rendah. Nah keadaan ini akan dimanfaatkan oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab untuk memasukan barang-barang yang di butuhkan oleh masyarakat tersebut secara ilegal (penyelundupan).

5. Transportasi

Masalah penyelundupan akan ditentukan pula oleh faktor transportasi. Daerah - daerah tertentu di Indonesia dalam mendatangkan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat sering mengalami keterlambatan, disebabkan belum lancarnya hubungan antara satu pulau dengan pulau lainnya. Bahkan seperti pulau nias, simeulue (Sinabang), singkel dan lain-lain beberapa waktu lampau sering tergantung pada keadaan alam (cuaca) apabila ingin mendatangkan barang-barang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan sehari-hari ke daerah tersebut karena hubungan darat dari daerah lain memang belum tersedia. Akibatnya masyarakat di daerah-daerah terpencil serupa itu sering memasukan barang-barang kebutuhan pokoknya secara tidak sah (kadang-kadang dibawa oleh kapal besar asing). Hal ini ditambah lagi dengan letak di daerah-daerah (pulau-pulau) tertentu di Indonesia memang berdekatan dengan negara-negara tetangga. Luasnya wilayah kepulauan serta banyaknya daerah-daerah ditanah air kita yang belum lancar sarana trasportasinya jelas membuka peluang para penyelundup untuk melakukan aksinya, 41 hal ini ditambah lagi dengan letak kepulauan - kepulauan tersebut yang sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga kita yang industrinya telah terlebih dahulu mengalami kemajuan.

2.3.3 Pasar Gelap

Black market yang sering disingkat menjadi sebutan BM merupakan keadaan suatu barang yang sama persis dengan aslinya tapi bukan merupakan barang original atau seperti replika saja atau banyak orang menyebutnya sebagai barang reject. Barang elektronik banyak beredar secara ilegal atau melalui pasar gelap. Pasar gelap atau dalam bahasa inggris di sebut blackmarket ialah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan secara tidak sah. Barang-barangnya sendiri bisa ilegal, seperti penjualan senjata atau obatobatan terlarang, barang curian ataupun sebaliknya barang elektronik atau barang dagangan barang kali yang resmi tetapi dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak atau syarat lisensi. Pada intinya barang Blackmarket atau pasar gelap ini adalah barang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperdagangkan ilegal atau tidak melewati cukai untuk pembayaran pajak. Menurut Gita Wirjawan Menteri Perdagangan (Mendag) menyatakan bahwa barang-barang elektronika seperti smartphone (HANDPHONE) yang beredar di pasar dalam negeri banyak yang diimpor ilegal. Barang ilegal itu termasuk yang diselundupkan, sehingga merugikan penerimaan negara sangat besar dari sisi bea impor hingga pajak. Dengan selundupan yang begitu banyak, negara dirugikan triliunan (rupiah) dan rakyat juga dirugikan,". Sudah menjadi rahasia umum handphone ilegal yang diselundupkan biasanya dijual di pasar gelap blackmarket. Kasus-kasus handphone rekondisi, alias handphone lama yang didaur ulang jadi handphone “ baru “ kerap dialami konsumen.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) triwulan I-2013 menyebutkan bahwa terdapat 4.000 ton ponsel yang diimpor selama Januari-Maret atau senilai US\$ 649,6 juta atau sekitar Rp 6,1 triliun. Bahkan Menteri Perindustrian MS Hidayat mengungkapkan, Indonesia pada tahun 2012 mengimpor sebanyak 50 juta unit handphone. Peraturan mengenai handphone Blackmarket sudah jelas di atur dan memiliki sanksi bagi orang yang melanggar, akan tetapi dalam kenyataan di lapangan handphone Blackmarket ini beredar luas serta di perjual belikan oleh banyak orang di setiap daerah, setiap kota dan banyak konsumen yang membeli dan menggunakan barang tanpa izin tersebut, padahal ini sedah jelas-jelas di larang oleh Pemerintah bagi penjual untuk memperjual belikan barang tanpa izin tersebut dan ada sanksi untuk pelanggar dan sanksi juga tidak ringan. Peredaran handphone black market juga berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor barang, hal ini dapat di tinjau dari status barang yang tidak memiliki izin Bea dan Cukai. Handphone black market biasanya didapat dari Negara tetangga lalu masuk ke

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara Indonesia tanpa melalui jalur resmi atau dapat dikatakan penyelundupan barang dengan status tidak resmi (Illegal). Masalah perizinan terhadap status barang handphone.

Peraturan mengenai handphone Blackmarket sudah jelas di atur dan memiliki sanksi bagi orang yang melanggar, akan tetapi dalam kenyataan di lapangan handphone Blackmarket ini beredar luas serta di perjual belikan oleh banyak orang di setiap daerah , setiap kota dan banyak konsumen yang membeli dan menggunakan barang tanpa izin tersebut, padahal ini sedah jelas-jelas di larang oleh Pemerintah bagi penjual untuk memperjual belikan barang tanpa izin tersebut dan ada sanksi untuk pelanggar dan sanksi juga tidak ringan.

Peredaran handphone black market juga berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor barang, hal ini dapat di tinjau dari status barang yang tidak memiliki izin Bea dan Cukai. Handphone black market biasanya didapat dari Negara tetangga lalu masuk ke Negara Indonesia tanpa melalui jalur resmi atau dapat dikatakan penyelundupan barang dengan status tidak resmi (Illegal). Masalah perizinan terhadap status barang handphone. Black market tersebut menjadi permasalahan hukum yang berkaitan dengan UndangUndang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

2.4 Jenis-Jenis, Potensi dan Bentuk-bentuk Penyelundupan

2.4.1 Jenis-jenis Penyelundupan

Pada umumnya penyelundupan (dalam Djoko Prakoso 1987:64) itu terdiri dari dua jenis yakni penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor. Penyelundupan impor adalah suatu perbuatan memasukan barang-barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia dengan tidak melalui prosedur yang ditentukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri. Sedangkan penyelundupan ekspor adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang ditentukan untuk itu.

Disamping itu, sekarang kita kenal adanya jenis lain, yakni penyelundupan Legal dan penyelundupan Ilegal, penyelundupan legal ialah pemasukan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia atau mengeluarkan barang dari Indonesia ke luar negeri dengan melalui prosedur yang ditentukan yakni dilindungi dengan dokumen, tetapi dokumen tersebut tidak sesuai dengan barang yang dimasukan atau barang yang dikeluarkan. Tidak sesuainya itu umumnya dalam hal jenis kualitas, kuantitas dan harga barang. Sedangkan penyelundupan ilegal itu ialah pemasukan atau pengeluaran barang tanpa dilindungi dokumen. Penyelundupan legal dan penyelundupan ilegal atau sering disebut dengan penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik. Keduanya tidak disebut oleh undang-undang istilah ini digunakan sebagai bahasa sehari-hari.

Baharuddin Lopa merumuskan ciri - ciri penyelundupan Administratif dan penyelundupan fisik yaitu:

a. Penyelundupan Administratif

- 1) bahwa barang - barang impor dimasukan ke dalam daerah pabean dimana kapal atau alat pengangkut yang mengangkutnya, memasukkan barang-barang tersebut kepelabuhan-pelabuhan resmi atau pelabuhan tujuan yang ditentukan.
- 2) Kapal yang mengangkut memakai dokumen, misalnya memakai manifest, AA dan dokumen-dokumen lain yang diisyaratkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Bahwa dokumen-dokumen yang dipergunakan telah dibuat dengan tidak semestinya, misalnya manifest tidak cocok dengan jumlah barang yang diangkut, AA (Pemberitahuan Umum) tidak cocok dengan kenyataan barang yang dibongkar, terjadi pemberitahuan salah dalam PPUD atau formulir 5Bnya (kesalahan-kesalahan dokumen ini berlaku juga bagi ekspor).
- 4) Bahwa dalam hal kesalahan masih dalam tahap AA (Pemberitahuan Umum), bea-bea masuk dan pungutan-pungutan lain yang sah masih dapat diselamatkan karena sesudah pembongkaran, masih di perlukan pengajuan PPUD dari importirnya pada saat mana akan di perhitungkan bea-beanya dan sebagiannya. Sudah tentu tidak menutup kemungkinan dapatnya terjadi pelarian bea-bea masuk kalau di antara barang-barang itu yang sebagiannya telah dimanipulasikan mengenai kualitas dan kuantitas atau harganya dapat lolos di perdagangan bebas.

b. Penyelundupan Fisik

- 1) Pemasukan atau pengeluaran barang-barang tidak memakai dokumendokumen atau pada waktu berangkat memakai dokumen, tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang dipelabuhan yang dituju.
- 2) Kapal atau perahu yang mengangkut tidak memasuki pelabuhan resmi dan tidak melapor kepada petugas Bea Cukai setempat atau yang terdekat sehingga tidak terpungut bea-bea masuknya (dalam hal ekspor, devisanya tidak terpungut)
- 3) Atau dengan melalui pelabuhan resmi, tetapi dokumen-dokumen yang di pergunakan adalah dokumen-dokumen palsu, sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang-barang itu dapat diselesaikan dengan tidak membayar sepenuhnya bea masuk

- 4) Dengan perbuatannya tadi jelas kesengajaan memasukan barang-barang tanpa dilindungi dokumen.

2.4.2 Bentuk Penyelundupan

Total kasus yang diberitakan sebanyak : 98 kasus dengan lingkup kejadian

antara lain:

1. Penyelundupan barang
2. Narkotika (sabu, ganja)
3. Keimigrasian (TKI Ilegal dan TKA Ilegal)
4. Trafficking
5. Ilegal Trading (penjualan illegal, pembajakan software)
6. Money Laundry
7. Ilegal Logging - Lain-lain (Pelabuhan Liar, Rumah Liar, dsb)

2.5 Kebijakan Pemerintah Mengurangi Tindakan Penyelundupan Baranng

Di dalam Undan-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2006 dan tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4661).

Telah di atur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, khususnya tindak pidana penyelundupan dibidang impor, yaitu:

8. Pidana Penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
9. Pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Sedangkan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
2. Pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

Untuk tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara, yaitu:

1. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan dan pidan paling lama penjara 20 (dua puluh) tahun.
2. Pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Rumusan sanksi pidana peyelundupan sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 102, 102 A, dan pasal 102 B undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda. Namun jika sanksi denda tidak dapat dibayar dengan subsider pasal 30 KUHP maka sangat merugikan negara.

Dasar filosofi penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut terbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk “kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi, penerimaan negara yang diperlukan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayai pemabangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak”. Oleh karena itu, terhadap peaku tindak pidana penyelundupan perlu dikenakan sanksi pidana yang bersifat alternatif agar undang-undang kepabeanan dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara.

Dalam pasal 29 undang-undang tarif yang pernah berlaku dinyatakan kedadipun sudah dalam tingkatan penyidikan dan penuntutan Menteri Keuangan masih dapat meminta perhentian penyidikan dan penuntutan terhadap kasus penyelundupan sepanjang tersangka/terdakwa melakukan kewajiban hukumnya, yaitu melunasi bea-bea yang seharusnya dibayarkan oleh tersangka atau terdakwa kepada negara. Hal seperti ini tidak diformulasikan dalam undang-undang perubahan kepabeanan yang berlaku.

2.6 Konsep Islam Tentang Penyelundupan Barang

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa tindak kejahatan “Penyelundupan” merupakan suatu perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Seseorang yang melakukan kejahatan pada orang lain berarti seolah-olah telah melakukan kejahatan pada semua orang, karena dengan demikian manusia sudah tidak merasa terjamin lagi hak hidupnya karena merasa ketakutan. Hal ini diajarkan pada:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: *oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.(Qs. Al-Maidah:32)*

Penipuan “Penyelundupan” menghilangkan fungsi rezeki yang paling besar, yaitu perdagangan dan tukar manfaat (keuntungan) sesama manusia dan bangsa baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Jika sumber itu tidak berfungsi kerusakan berkembang dan sumber rezeki manusia terputus. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Qs. An-Nisa’ 29)*

Dalam ayat di atas menjelaskan praktik bisnis dan ekonomi yang tidak dibenarkan oleh al-Qur’an, juga pada ayat di atas ditegaskan pula larangan bisnis yang dilakukan dengan proses kebatilan. Riba merupakan “sub ekonomi” yang berprinsip menguntungkan kelompok tertentu, tetapi mengabaikan kepentingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat luas. al-Qur'an hadir dengan nilai-nilainya untuk membangun kesejahteraan umat manusia yang seimbang antara dunia dan akhirat antara individu dan masyarakat dalam aspek bisnis, alQur'an menawarkan prinsip keadilan dan "kesucian" yaitu melarang pemilihan harta yang terlarang zatiniyah (haram), terlarang cara dan proses memperolehnya dan terlarang pada dampak pengelolanya jika merugikan pihak lain (ada pihak yang menganiaya atau teraniaya).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالرِّبَا أَضْعَافٍ مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٣٠

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat gandapan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Qs. Ali-Imran 130)*

Kata keadilan dalam sistem ekonomi Islam berarti kebebasan yang bersyarat. Keadilan dalam produksi dan konsumsi ialah menghindari penindasan dan pemberantasan kebaruan. Keadilan dalam distribusi yang tepat; distribusi pendapatan dan kekayaan harus merata bagi seluruh manusia.

2.7 Penelitian Terdahulu

1. Maraknya Penyelundupan Barang Ilegal Di Wilayah Perbatasan Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia merupakan penelitian Muhammad Aulia Pratama tahun 2017. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui, mengeksplorasi dan mendeskripsikan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemeerintah Indonesia dalam meminimalisirkan adanya penyelundupan barang ilegal di wilayah perbatasan. Selanjutnya juga ingin mengetahui, memahami dan mendeskripsikan bagaimana implikasinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap penanggulangan barang ilegal di perbatasan yang dilakukan oleh institusi Bea Cukai. Sedangkan manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan pengembangan ilmu hubungan internasional, dan secara praktis diharapkan berguna dan bermanfaat memberikan masukan sebagai pemecah masalah-masalah dampak positif dan negatif dari penyelundupan barang ilegal di kawasan perbatasan Indonesia dan Singapura. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi, yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena dalam hal ini perkembangan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam meminimalisir penyelundupan barang ilegal secara sistematis untuk diteliti dan dicari pemecahan masalahnya. Hasil dari penelitian ini adalah untuk meminimalisir adanya suatu fenomena penyelundupan barang ilegal, pemerintah Indonesia khususnya instansi Bea Cukai berkerjasama dengan polisi perairan (polair) dan angkatan laut (AL). Dalam Kasus penyeludupan ilegal, binatang dan uang (smuggling) dari Indonesia ke Singapura, transaksi BBM ilegal, praktek money laundry, trafficking, illegal fishing adalah sebagian dari praktekpraktek ilegal yang terjadi. Praktek-praktek “underground economy” semacam ini memang tidak berdiri sendiri karena disinyalir melibatkan oknum petugas dan adanya ‘transaksi’ antara oknum petugas dan oknum pengusaha. Praktek semacam ini tentu saja tidak hanya merusak sistem dan regulasi yang telah berjalan namun juga sangat berpotensi merugikan negara dari sisi ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor (Studi Kasus Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY) merupakan penelitian Feryra Preziliya Darawerti tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penindakan tindak pidana penyelundupan barang impor yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dan mekanisme dalam penerapan sanksi terhadap para pelaku tindak pidana penyelundupan serta pertimbangan hakim dalam mengambil putusan terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Peneliti memaparkan hasil penelitian secara deskriptif analitis, mengenai objek penelitian yakni dua putusan Pengadilan Negeri Semarang. Pemaparan hasil penelitian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan buku-buku. Hasil penelitian ini dapat menjelaskan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor yang ditangani oleh Penyidik Bea dan Cukai sebagai pihak yang berwenang dalam menangani perkara kepabeanan dan cukai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepabeanan. Pada prosedur penindakan dalam menangani penyelundupan barang impor, penyidik bea dan cukai telah melaksanakan prosedur penindakan yang telah diatur dalam peraturan per Undang-undangan tentang kepabeanan. Tidak hanya pada prosedurnya saja tetapi penyidik juga telah menerapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sanksi pidana secara tegas terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan. Penjatuhan sanksi pidana terhadap dua putusan tersebut yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan fakta-fakta yang ada maka Hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa denda kepada para pelaku tindak pidana penyelundupan dengan tujuan agar memberi efek jera.

2.8 Definisi Konsep

Untuk menghindari kesalahan pemahaman penafsiran dalam penelitian ini, maka sebelumnya penulis akan mengoperasikan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini di antara lain, yaitu:

- a) Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan, dalam pendapatnya lebih lanjut menjelaskan apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran, perbedaan antara kedudukan
- b) Pengawasan adalah proses pemantauan kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar dan tujuan organisasional yang di harapkan.
- c) penyelundupan adalah suatu perbuatan manusia yang memasukkan atau mengeluarkan barang dari dalam negeri atau keluar negeri dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan, atau dengan kata lain tidak dengan secara resmi sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

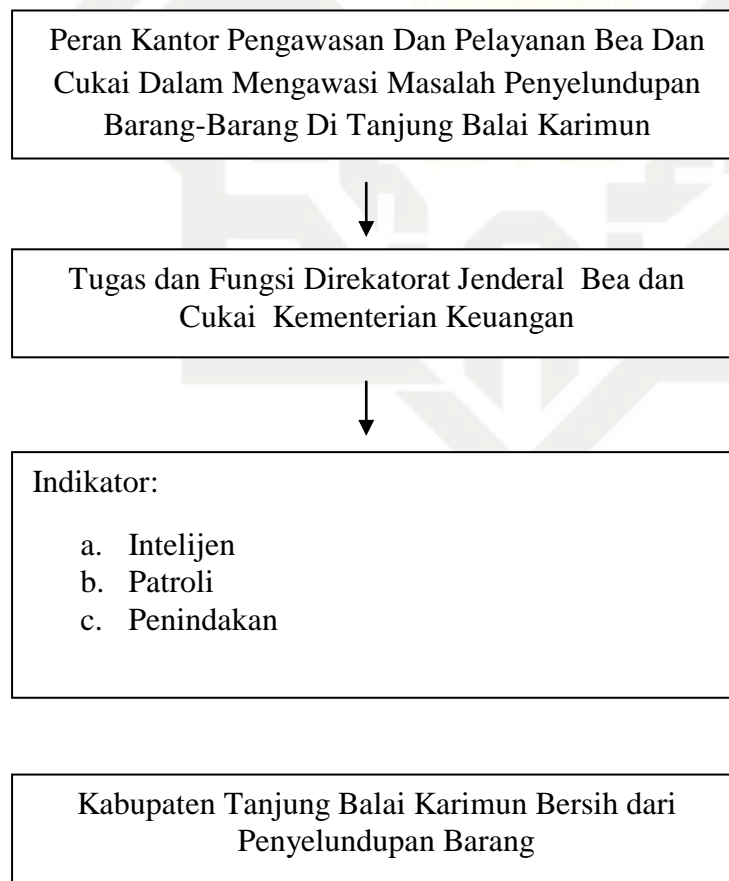
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Pelayanan Bea Cukai adalah kegiatan yang dilakukan oleh kantor Bea dan Cukai dalam menertibkan barang-barang yang masuk ke dalam wilayah teritorialnya khususnya Tanjung Balai Karimun, melalui sistem dan prosedur sesuai yang telah ditetapkan oleh Dirjen Bea dan Cukai.
- e) Penyelundupan barang adalah membawa barang secara ilegal atau tidak memiliki izin dari pihak Bea dan Cukai dan tentunya bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya.

2.9 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran Tentang Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam Mengawasi Masalah Penyelundupan Barang-Barang Di Tanjung Balai Karimun



Sumber: Tupoksi Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Konsep Operasional

Tabel 2.1: Konsep Operasional tentang Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam Mengawasi Masalah Penyelundupan Barang-Barang Di Tanjung Balai Karimun

Variabel	Indikator	Item yang dinilai
1	2	3
Peranan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam Mengawasi Penyelundupan Barang	1. Intelijen	<ol style="list-style-type: none"> Penetapan tim intelijen di lapangan Memiliki strategi dalam melakukan tugas di lapangan Mendapatkan informasi di lapangan, untuk mempermudah melakukan penindakan
	2. Patroli	<ol style="list-style-type: none"> Penetapan Standar Operasional dalam melakukan patroli di lapangan Membentuk tim patroli di lapangan Sarana dan prasarana yang diberikan kepada tim patroli pada saat bertugas di lapangan Melakukan sosialisasi kepada pihak yang memiliki barang yang akan distribusi ke dalam wilayah Tanjung Balai Karimun
	3. Penindakan	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pemeriksaan terhadap barang, surat atau dokumen dengan barang atau pelaku Melakukan penangkapan terhadap pelaku penyelundupan barang Pemberian sanksi secara administrasi dan sanksi pidana kepada pelaku penyelundupan barang Penyitaan barang-barang ilegal

Sumber: Tupoksi Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun